

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Pada pembahasan mengenai konsep kesejahteraan sosial ini, peneliti membahas tentang : pengertian kesejahteraan sosial, tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relative berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sudah lama sepanjang kehidupan manusia. Negara-negara maju dan negara industri sekarang ini, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang teratur.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang berorientasi untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, permasalahan permasalahan yang perlu

penanganan serius biasanya berkaitan dengan sosial dan ekonomi, penanganan permasalahan harus dilakukan secara sistematis oleh lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta. Menurut Friendlander (Fahrudin, 2014:9) bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah:

Sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditunjukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya. Adapun definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010:3) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Definisi diatas menjelaskan tentang kesejahteraan sosial yang merupakan suatu lembaga sosial baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang berperan penting untuk mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi untuk memecahkan setiap permasalahan sosial yang terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari individu, kelompok maupun masyarakat. Definisi lain mengenai kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh James Midgley (1995:5) yang dikutip dalam Adi (2018:4) yaitu sebagai berikut: "Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta

ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”.

Dilihat dari definisi tersebut maka kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi sejahtera, yaitu suatu permasalahan baik dalam tingkatan rendah sampai tingkatan tinggi dapat dikelola dengan baik, keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan yang bersifat mendasar seperti pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dapat di dimaksimalkan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

2.1.2 Tujuan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial selain mempunyai tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, kesejahteraan sosial juga harus mampu menjadikan masyarakat sebagai faktor utama dalam pembangunan sosial di kehidupan dan lingkungan utama masyarakat. Kesejahteraan sosial dalam penerapannya di lingkungan sosial masyarakat, kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat yaitu dengan cara membantu masyarakat mencapai suatu taraf kehidupan yang baik. Menurut Fahrudin (2014:10) kesejahteraan mempunyai dua tujuan yaitu :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kutipan diatas menyatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat diantaranya, dapat terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menggali sistem sumber yang dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa, penyelenggara kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan serta memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam mencapai tingkat kemandirian.

2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)
3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Support*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi. Fungsi-fungsi yang kesejahteraan sosial terdiri dari fungsi pencegahan yang berfungsi untuk mencegah masalah-masalah sosial yang akan terjadi, fungsi penyembuhan yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan dan memulihkan masalah sosial, fungsi

pengembangan yang berfungsi untuk melakukan pengembangan yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan yang ada disekitar masyarakat dan terakhir fungsi penunjang yang berfungsi untuk membantu dan mempercepat proses kegiatan agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh lembaga pelayanan sosial.

2.1.4 Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 yaitu sebagai berikut : “Semua upaya untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.”

Usaha kesejahteraan sosial tersebut memiliki aspek-aspek yang dimana harus diperhatikan menurut Suud (2006: 80) yakni sebagai berikut :

- 1) Menyediakan sumber-sumber pemecahan masalah yang memadai dan dapat dipakai oleh yang membutuhkan.
- 2) Pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial atau penggunaan sumber-sumber pemecahan masalah harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - a. Perencanaan pemecahan masalah yang sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini perlu diperhatikan penentuan-penentuan tujuan yang jelas akan tetapi bersifat dinamis.
 - b. Supervisi dan pengawasan pelaksanaan secara teratur agar usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
- 3) Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial harus tetap bersifat demokratik dan menggerakkan sebanyak mungkin para pelaku dalam arti keterlibatan semua unsur dan sel-sel yang ada dalam masyarakat.
- 4) Menghindarkan dan menghilangkan akibat dampak yang buruk dari pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

Usaha kesejahteraan sosial yang sudah diuraikan diatas, menjelaskan usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kehidupan sosial seseorang agar semakin mampu, peduli dan bertanggung jawab atas kehidupan sosialnya dan menjalankan usaha kesejahteraan sosial harus memperhatikan aspek-aspek yang ada sehingga dapat membantu dalam pemecahan masalah yang sesuai dengan kenyataan serta terhindar dari dampak yang buruk ketika melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan tugas pertolongan profesional yang memiliki tugas pokok yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan jalan memberikan kemungkinan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Pekerja sosial dalam menjalankan tugas berada dalam naungan badan sosial yang bergerak dalam pelayanan-pelayanan sosial.

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan adalah suatu profesi yang profesional dalam membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat menjalankan peranan sosialnya. Adapun pengertian dari pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009:1) yaitu:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut definisi diatas dapat diartikan bahwa pekerjaan sosial merupakan proses pendampingan secara profesional dalam membantu klien baik secara individu, kelompok atau masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi klien, sehingga klien tersebut bisa kembali kesemula dan mencapai keberfungsian sosial. Adapaun definisi lain mengenai pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Max Siproin (1975) dalam Pujileksono dkk (2018;12) yaitu: "Pekerjaan sosial adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya dilakukan oleh orang yang mendapatkan pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin dan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya". Sementara definisi pekerjaan sosial menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte (1980) dikutip dalam Pujileksono dkk (2018;13) yaitu:

Pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional yang praktiknya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan pertolongan yang profesional yang dilandaskan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang didapatkan dari pendidikan khusus dan formal (lulusan dari S1,S2,S3 Ilmu kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial) guna membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan mereka.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial berusaha untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat secara lebih keseluruhan untuk lebih memahami kebutuhan mereka

serta membantu mereka agar tercapainya tingkat kesejahteraan mereka baik secara mental dan psikis yang setinggi mungkin.

Dengan memberikan pelayanan kepada klien, pekerja sosial memberikan pelayanan dengan tujuan tertentu yang dibatasi secara spesifik. Tujuan secara spesifik ini telah dibuat berdasarkan keunikan yang dimiliki oleh individu dan juga situasi probelantik pada lingkungan tertentu yang dihadapinya. Definisi tujuan pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan yang dikutip Sukoco (2011: 19) yaitu sebagai berikut :

- a. *Enhance the problem solving and coping capaties of people* (peningkatan pemecahan masalah dan kapasitas seseorang).
- b. *Link people with systems that provide them with resources, services and opportunities* (menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan mereka sumber, pelayanan dan kesempatan).
- c. *Promote the effective and humane operation of these systems* (mempromosikan operasi efektif dan keramahan dari sistem ini).
- d. *Contribute to the development and improvement of social policy* (berkontribusi untuk mengembangkan dan perbaikn dari kebijakan sosial).

Pekerjaan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan orang, baik sebagai individu maupun kolektifitas. Pekerjaan sosial berusaha membantu agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, bisa menghubungkan dengan sistem sumber yang tidak ternilai, dan juga bisa mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerjaan sosial disini tidaklah hanya membantu seseorang saja akan tetapi dengan hal lain juga dapat berkaitan dengan sistem sumber dan kebijakan sosial lainnya.

2.2.3 Tahapan Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam upaya membantu atau menolong individu, kelompok, atau masyarakat untuk bias memecahkan permasalahan yang dihadapi mereka,

terdapat prosedur intervensi yang harus dilalui oleh pekerja sosial dengan klien agar pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan tersebut bias sesuai dengan yang mereka hadapi dan butuhkan. Berkaitan dengan proses intervensi pekerjaan sosial menurut Iskandar (2013:65) sebagai berikut:

- a. Tahap Engagement, Intake, dan Kontrak
Tahap pertama pekerja sosial bertemu dengan klien untuk bertukar informasi yang dibutuhkan, jenis pelayanan apa yang bisa diberikan oleh pekerja sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien, lalu akan terjadi proses saling mengenal kemudian terciptalah kontak.
- b. Tahap Assesment
Pada tahap selanjutnya merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi klien meliputi; bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab dan akibat serta pengaruh masalah dapat ditetapkan fokus atau akar masalah klien.
- c. Tahap Planning
Pada tahap rencana intervensi dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang.
- d. Tahap Intervention
Pada tahap ini pekerja sosial memulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien yang sudah direncanakan sebelumnya, dan pekerja sosial mengharapkan bahwa klien dapat mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif.
- e. Tahap Evaluation
Pada tahap ini merupakan tahap pengevaluasian terhadap kegiatan intervensi yang telah dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan, kegagalannya atau hambatan yang dialami oleh klien pada pemecahan masalahnya.
- f. Tahap Terminasi
Tahap ini merupakan tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakukan bila tujuan intervensi telah tercapai atau permintaan klien sendiri atau karena faktor-faktor eksternal yang lebih baik klien dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli yang lebih berkompeten.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa tahapan pekerjaan sosial untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat yaitu tahapan engagement,

intake dan kontrak yang merupakan tahapan pertama (kontak awal) untuk saling mengenal, mengambil seseorang sebagai klien serta membuat kontrak dengan waktu yang telah disepakati bersama, tahapan kedua yaitu tahap assessment yang mana pada tahapan ini merupakan proses pengungkapan masalah, tahapan ketiga yaitu tahap planning yang merupakan tahap untuk merencanakan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah, kemudian tahapan keempat yaitu tahap intervensi yang merupakan tahapan untuk melaksanakan kegiatan pemecahan masalah, selanjutnya tahap evaluasi yang mana pada tahapan ini dilakukannya evaluasi kembali terhadap kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan, apakah sudah memberikan hasil atau tidak, dan yang terakhir yaitu tahap terminasi yang mana merupakan tahap akhir atau tahapan pemutusan kegiatan intervensi pemecahan masalah.

2.3 Tinjauan Tentang Masalah Sosial

Masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat, kondisi yang tidak diinginkan tersebut merupakan kondisi tidak sesuai dengan harapan atau tidak dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku, serta dapat menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian fisik maupun nonfisik.

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu masalah yang mana sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Masalah sosial yang sering terjadi disini dimana karena adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah juga bisa

diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak mengenakan karena terjadinya perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, kelompok maupun dengan masyarakat. Masalah sosial menurut definisi Soetarno dalam Huraerah (2011:4) :

“Masalah sosial merupakan kondisi yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan sangat sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang yang menilainya tidak sebagai masalah”.

Dari uraian definisi diatas, menjelaskan bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi tidak mengenakan yang dirasakan oleh setiap orang. Setiap masalah sosial (masalah besar maupun masalah kecil) yang dialami seseorang itu tergantung pada individu ataupun masyarakat dalam menghadapi dan juga menyelesaikan masalahnya. Masalah sosial tidak akan bisa terselesaikan tanpa adanya usaha yang maksimal dalam penyelesaiannya.

Setiap manusia mempunyai pandangan tentang masalah, baik masalah individu, kelompok maupun masyarakat. Karena setiap masalah muncul karena adanya perbedaan persepsi. Begitupun dengan masalah sosial Kartini Kartono dalam Huraerah (2011:4) mempunyai pandangan tentang masalah sosial, diantaranya adalah :

- a. semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan istiadat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama)
- b. situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Dengan demikian, jelas bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat adat istiadat yang diperlukan untuk menjamin kehidupan masyarakat. Adat istiadat

dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrolan dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Oleh karenanya, tingkah laku dianggap tidak cocok apabila melanggar norma dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, dikategorikan sebagai masalah sosial.

Masalah sosial mempunyai beberapa komponen, komponen tersebut dikemukakan oleh Parillo yang dikutip oleh Soetomo dalam Huraerah (2011:5), untuk lebih memahami masalah sosial perlu memperhatikan komponennya, yaitu :

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan kepecahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa masalah sosial akan terjadi dan bertahan lamanya sesuai dengan jenis masalah tersebut apabila individu atau masyarakat melanggar nilai atau standar sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga akan mengakibatkan kerugian fisik atau mental dan rohani dan juga akan menimbulkan perpecahan.

Rober K. Merton mendefinisikan masalah sosial dengan menyebut ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya ciri-ciri masalah sosial itu adalah “jurang perbedaan yang cukup signifikan antara standar-standar sosial dengan kenyataan sosial”. Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa masalah sosial akan menjadi suatu jurang pemisah antara haraapan-harapan yang ada, baik pada seorang individu, kelompok atau masyarakat,

dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai, dan tujuan apa yang bisa tercapai serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak mengenai apa yang dapat diperoleh orang didalam suatu masyarakat.

Menurut Horton dan Leslie dalam Susanto (2011:71) masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta pemecahan aksi sosial secara kolektif. Dari definsi tersebut dapat diuraikan, masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kondisi yang dirasakan banyak orang
Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila dirasakan oleh banyak orang. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum, jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul dimedia massa, masalah tersebut akan menarik perhatian orang.
- b. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan
Menurut Faham Hendonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan.
- c. Kondisi yang menuntut pemecahan
Suatu kondisi yang baik menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan, umumnya suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.
- d. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif
Masalah sosial individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akhirnya multidimensional dan menyangkut banyak orang.

Dengan demikian dapat diuraikan, bahwa karakteristik dari masalah sosial yaitu suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh banyak orang,

dimana orang tersebut merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, rasa tidak menyenangkan, sehingga kondisi tersebut sangat membutuhkan suatu pemecahan dan penyelesaian. Penyelesaian masalah sosial harus dilakukan melalui rekayasa sosial. Seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial. Karena masalah sosial bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.3.2 Komponen Masalah Sosial

Situasi sosial disebut juga sebagai masalah sosial yang apabila dapat beberapa komponen didalamnya. Komponen masalah sosial merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi suatu kondisi di lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Menurut Soetomo (2013: 6) yang dikutip dari Parrillo (1987: 4) komponen masalah sosial adalah :

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari keempat komponen yang sudah tertera diatas, maka masalah sosial dapat mengandung beberapa komponen yang menjadi indikasi dalam keberadaan masalah sosial. Masalah sosial yang dimana yaitu suatu kondisi maupun situasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang dapat menyebabkan adanya suatu pelanggaran pada nilai-nilai juga norma sosial sehingga akan membutuhkan dalam pemecahan masalahnya. Maka dengan demikian, komponen masalah sosial

itu sendiri memiliki periode waktu yang ditentukan dan juga bisa berdampak fatal dimana seharusnya mereka dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

2.4 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial.

2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik diluar maupun didirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Kahan dalam Fahrudin (2012:51) adalah :

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individu, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berdasarkan uraian definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan sosial merupakan pelayanan yang dikemas dalam sebuah program-program dari suatu lembaga untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan

masalah, meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.

2.4.2 Bidang-Bidang Pelayanan Sosial

Menurut Suharto (2013:14) dalam suatu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan sosial itu antara lain :

- a. Jaminan Sosial
Merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan.
- b. Pelayanan Perumahan
Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial.
- c. Kesehatan
Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi-asuransi kesehatan.
- d. Pendidikan
Negara memiliki 3 kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagian penyediaan utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah akademik, dan universitas.

2.5 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui program Inovasi Desa di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari merupakan suatu usaha pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui peningkatan kapasitas kampung dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan

pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat menjadi upaya penting dalam mendorong masyarakat kampung untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya dan berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing serta mandiri. Melalui Program Inovasi Desa, mendorong pembangunan kampung yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat kampung menggunakan Dana Desa.

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “*empowerment*” dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan (*empowerment*) yang diterjemahkan masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingannya sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka. Mardikanto dan Soebiato (2019:28) dalam bukunya mengartikan pemberdayaan sebagai “upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain”.

Selain itu menurut World Bank dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:28) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya serta

kemampuan dan keberaniannya untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.

Berbeda dengan pandangan konsep sebelumnya, Dharmawan dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:27) mendefinisikan makna pemberdayaan sebagai berikut :

“A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions and to more easily access to a source of better living”

Terjemahan dari definisi diatas adalah sebuah proses memungkinkan orang-orang memiliki kekuatan agar dapat mengembangkan kapasitasnya, memiliki kekuatan dalam tawar menawar agar mampu membuat keputusan-keputusannya sendiri dan untuk mempermudah akses terhadap sumber yang dapat meningkatkan hidupnya menjadi lebih baik. Parsons, et al dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:29) mendefinisikan pemberdayaan adalah :

Sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dengan konsep yang sedikit berbeda Anthony Bebbington dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:30) mengemukakan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

“Empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of deveopment, and distribution of their product”.

Terjemahan dari definisi diatas bahwa pemberdayaan adalah proses dimana mereka yang dikecualikan dapat berpartisipasi lebih penuh dalam keputusan tentang bentuk pertumbuhan, strategi pembangunan, dan distribusi produk mereka. Sumodiningrat dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:52), mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Seperti yang dikemukakan oleh Subejo dan Narimo (Mardikanto & Soebiato, 2019:32) yaitu :

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelolah sumberdaya lokal yang dimiliki melalui tindakan kolektif dan jaringan yang dapat menimbulkan masyarakat mendapatkan kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial sehingga masyarakat dapat mengelola segala sumberdaya sendiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan.

Berdasarkan literatur diatas, disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah usaha atau upaya memandirikan dan mensejahterakan menggunakan sumberdaya yang ada di masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran masyarakat.

2.5.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sudah tentunya memiliki tujuan (*goals*). Ife & Tesoriero menjelaskan tujuan pemberdayaan dalam sebuah definisi yang sederhana yaitu “pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Masih dalam makna yang sedikit sama, Payne dalam Huraerah (2011:99) memberi gambaran bahwa “tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya yang lebih besar”. Uraian mengenai tujuan dasar pemberdayaan diatas menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan mendasar dalam pemberdayaan yaitu memberikan keadilan sosial kepada masyarakat dengan melakukan suatu upaya atau cara-cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.5.3 Pemberdayaan Sebagai Proses

Proses pemberdayaan cenderung seringkali dikaitkan sebagai unsur pendorong. Secara konseptual Saraswati dalam Huraerah (2011:100) membagi proses pemberdayaan meliputi:

- 1) *Learning by doing*
Pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan atau suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
- 2) *Problem Solving*
Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- 3) *Self Evaluation*
Pemberdayaan harus mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- 4) *Self Development and Coordination*
Bahwa pemberdayaan harus mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- 5) *Self Selection*
Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
- 6) *Self Decisim*
Memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (*self confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self decisim*)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sebagai proses apabila pemberdayaan dijadikan sebagai proses belajar, pemecahan masalah, evaluasi secara mandiri, pengembangan diri, melakukan koordinasi, menetapkan langkah-langkah memilih tindakan yang tepat berdasarkan kepercayaan diri sendiri dan memutuskan sesuatu secara mandiri.

2.5.4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan penerima manfaat pemberdayaan tersebut adalah manusia yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya cukup dibatasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, tetapi juga harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus

dihadapi di tengah-tengah masyarakatnya. Mardikanto dan Soebiato (2019:223-226) memaparkan lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari :

1. Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi tawar-menawar). Oleh sebab itu lingkup materi pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada dua hal yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan posisi-tawar masyarakat.

2. Bina Usaha

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti peningkatan penguatan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai-tambah produk; perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan; pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal; peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi; advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

3. Bina Lingkungan

Pembangunan yang dilakukan Indonesia, sejak awal tahun 1970-an telah membawa dampak negatif sebagai perusak hutan terbesar, pencemaran dari limbah industri/pertanian/rumahtangga, serta lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran lingkungan (sumberdaya-alam dan lingkungan hidup yang lain) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

4. Bina kelembagaan

Bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya, adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

Berdasarkan uraian lingkup kegiatan pemberdayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada empat lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu lingkup yang pertama adalah bina manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua bina usaha yang bertujuan untuk membina usaha serta meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, yang ketiga yaitu bina lingkungan yaitu membimbing masyarakat untuk tetap menjaga

kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang dimiliki, dan yang terakhir ialah bina kelembagaan yang mana bertujuan untuk membimbing lembaga-lembaga yang sudah ada agar bekerja secara efektif.

2.5.5 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Seodijianto dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:108-109) memunculkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesukarelaan
Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi kesadaran sendiri dalam motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya
- 2) Otonom
Kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, masyarakat ataupun kelembagaan lainnya.
- 3) Kesewadayaan
Kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu dan mengharapkan dukungan pihak luar.
- 4) Partisipatif
Keterlibatan semua *stakeholder* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan lainnya.
- 5) Egaliter
Menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
- 6) Demokrasi
Memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan diantara *stakeholder*.
- 7) Keterbukaan
Keterbukaan yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
- 8) Kebersamaan
Kebersamaan untuk saling berbagi rasa, saling membantu, dan mengembangkan sinergisme.
- 9) Akuntabilitas
Akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

10) Desentralisasi

Memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Literatur di atas mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan dan dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip pemberdayaan, keterlibatan seseorang dalam sebuah kegiatan pemberdayaan harus berdasarkan pada keinginan berpartisipasi sendiri tanpa adanya paksaan, harus mandiri dengan tidak bergantung kepada siapapun, dan harus mampu melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab atas kegiatan tersebut serta berpartisipasi dengan siapapun yang terlibat dengan kegiatan pemberdayaan, menempatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan kegiatan pemberdayaan pada posisi yang sama, memberikan hak kepada semua orang untuk memberikan pendapatnya, kegiatan pemberdayaan harus terbuka, dilakukan secara bersama-sama, dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

2.5.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan tahapan-tahapan pemberdayaan. Lippit dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:123) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pokok yaitu:

1) Penyadaran

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

2) Menunjukkan adanya masalah

Kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisik, teknis, sosial budaya, dan politis.

- 3) Membantu pemecahan masalah
Sejak analisis akar masalah, analisis alternative pemecahan masalah, serta pilihan alternative pemecahan masalah tersebut yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- 4) Menunjukkan pentingnya perubahan
Perubahan yang sedang dan akan terjadi dilingkungkannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternnal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.
- 5) Melakukan pengujian dan demonstrasi
Sebagai bagian dan implementasi perubahan yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial-budaya dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya.
- 6) Memproduksi dan publikasi informasi
Baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll). Maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indigenous techlonogy, maupun kearifan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhan.
- 7) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas
Pemberian kesempatan kepada lapisan bawah (greesroots) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan: aksesbilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

Tahapan masyarakat terdiri dari tujuh tahap yaitu tahap penyadaran, menunjukkan adanya masalah, membantu pemecahan masalah, menunjukkan pentingnya perubahan, melakukan pengujian dan demonstrasi, memproduksi dan publikasi informasi dan melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas. Disatu sisi, Tim Delivery dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:125)

menawarkan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang secara rinci masing-masing tahapnya adalah:

1. Tahap seleksi lokasi
2. Tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat
3. Tahap proses pemberdayaan masyarakat
 - a. Kajian keadaan pedesaan partisipatif
 - b. Pengembangan kelompok
 - c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
 - d. Monitoring dan evaluasi partisipatif
2. Tahap Pemandirian masyarakat

Berdasarkan konsep tentang tahapan pemberdayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam pemberdayaan perlu adanya peninjauan secara langsung ke lokasi, melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi dan terakhir pemandirian masyarakat.

2.5.7 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan membutuhkan adanya suatu strategi agar kegiatan pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik, dalam kaitannya dengan pemberdayaan Edi Suharto (2009:67-68) mengemukakan 5 (lima) P strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Pemungkinan: yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural.
2. Penguatan: melalui memperkuat pengetahuan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan: yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dari kutipan diatas menjelaskan tentang lima strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan ketika hendak melakukan suatu kegiatan pemberdayaan. Kelima strategi pemberdayaan seperti pemungkinan yang mana strategi ini diharapkan mampu membantu potensi masyarakat miskin hingga berkembang secara optimal. Sedangkan srategi penguatan diharapkan mampu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin untuk membantu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dan juga pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya stategi perlindungan yaitu untuk mrlindungi kelompok yang ada di masyarakat terutama kelompok lemah supaya tidak tertindas oleh kelompok kuat dan juga menghindari persaingan yang tidak seimbang. Kemudian strategi penyokongan yaitu untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat yang miskin agar mereka mampu menjalankan peran dan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir yaitu strategi pemeliharaan yang diharapkan kegiatan

pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan agar kelompok lemah dan kelompok kuat memperoleh kesempatan berusaha yang sama.

2.6 Tinjauan Tentang Potensi Diri

Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Potensi diri yang dimaksudkan disini yaitu suatu kekuatan yang masih terpendam, baik berupa potensi fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang tetapi belum dimanfaatkan dan diolah.

2.6.1 Pengertian Potensi Diri

Wiyono (2006:37) menjelaskan, “potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bisa dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik”. Definisi lainnya menurut Sri Habsari (2005:2) menjelaskan, potensi diri adalah :

Kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki.

Berdasarkan uraian definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa potensi diri merupakan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki oleh seseorang dan kemampuan tersebut akan terus berkembang apabila terus dilatih dan ditunjang oleh sarana yang baik.

Menurut Endra K Pihadhi (2004:6) menjelaskan “potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal”. Potensi diri yang dimaksud disini suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah.

Menurut panitia paedagogik dalam Abu, Ahmadi, yang dimaksud dengan daya berpikir atau intelegensi adalah alat-alat berpikir menurut tujuannya (stem, kamus paedagogik 1953). Disini dapat dilihat Stem menitik beratkan kepada soal “adjustment” terhadap masalah yang dihadapinya.

Orang yang intelegen akan lebih cepat dan lebih tepat didalam menghadapi masalah-masalah baru dibandingkan orang-orang kurang intelegen. William Stern, salah seorang pelopor dalam penelitian Intelegensi mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat segenap alat-alat bantu dari pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru.

Intelek, akal budi atau intelegensi adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dari proses berpikir (Kartini Kartono 2006). Orang yang arid akan berpikir menabung, mengkombinasikan, mencari kesimpulan dan memutuskan. Maka orang yang intelegent dapat menjelaskan semua itu dalam tempo yang singkat, bisa memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, dan mampu bertindak cepat (jiwanya lebih lemas).

Kekuatan atau intensitas rejana atau perasaan itu bergantung pada factor emosionalitas yaitu besar kecilnya kepekaan terhadap perasaan. Dominasi dari

perasaan-perasaan yang menyenangkan disebut eukoloi (jika tunggal; *eu kolos*). Pribadi bersangkutan cenderung melihat semua pengalamannya dengan rasa optimis dan dengan segera ia melihat segi-seginya yang indah serta menyenangkan. Sebaliknya dominasi perasaan negatif dan tidak menyenangkan disebut dyskoloi (tunggal;*dyskolos*). Cenderung melihat gejala kejadian dengan rasa duka, tidak senang, cemas/takut, penuh pesimisme (Kartini Kartono, 1990:80). Perasaan rohaniah dibagi dalam enam kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Perasaan intelektual ialah perasaan yang dialami, apabila kita memahami satu kebenaran dengan pikiran kita yaitu merupakan rasa senang, tidak puas, sengsara karena tidak bisa menangkap dan mengerti suatu masalah.
- b. Perasaan estetis adalah perasaan indah/buruk ketika kita melihat dan mendengarkn sesuatu (perasaan keindahan). Keindahan bergantung pada bakat dan perkembangan indra yang berkenan dengan selera.
- c. Perasaan eti (moral/sosial) ialah perasaan yang kita alami pada penghayatan benar/baik, atau salah/jahat, kedua ukuran untuk merasakannya adalah hati nurani, *conscience*.
- d. Rasa diri adalah perasaan menghayati perasaan tingginya harga diri sendiri. Menurut Alfred Adler dalam Kartini Kartono meliputi perasaan lebih yang positif yakni rasa kuat, mampu, megah, dan optimis. Sedangkan perasaan lebih yang negative yakni sombong, congkak, terkabur, kacak, tinggi hati.

- e. Perasaan sosial adalah perasaan terhadap orang lain yakni perasaan mengenali suka duka orang lain dan ikut merasakan kehidupan orang lain antara cinta dan benci, perasaan dan permusuhan, simpati dan empati, kasihan, ikut merasa gembira, egosm, segan dan sosiolitas.
- f. Perasaan religious (metafisik atau absolut) ialah perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan Tuhan. Misalnya tawakal, percaya, keyakinan akan kuasa Tuhan, kepercayaan, rendah hati, kesadaran, dan penyesalan.

Slamet wiyono (2006:38) dalam bukunya (*Manajemen Potensi Diri*), potensi diri manusia dibagi dalam beberapa jenis yaitu :

- a. Potensi Fisik (Psychomotoric) / Indra

Potensi fisik berupa indra manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar dan lain-lain. Potensi fisik dapat dikatakan sebagai kekuatan energy yang dapat melakukan berbagai aktivitas yang menentukan mampu atau tidaknya sesuatu yang kita lakukan mengikuti hati dan pikiran, kemudian indra akan melakukan tindakan dan kegiatan untuk menggapai impian atau sesuatu tujuan.

Potensi ini tentunya ditunjang dengan kesehatan fisik/indra sehingga dapat berfungsi sesuai fungsinya. Kesehatan fisik merupakan faktor pendukung untuk melakukan segala aktivitas dan sebagai suatu

sumber potensi apabila ditunjang dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi cukup, mengkonsumsi makanan dengan seimbang, berolahraga secara teratur, dan memeriksakan kesehatan secara teratur.

b. Potensi Mental Intelektual (*Intellectual*)

Potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia terutama otak kiri dan otak kanan. Secara singkat fungsi otak kiri adalah untuk menghafal/mengingat, logika/menghitung, menganalisis, dan berbahasa. Sedangkan fungsi otak kanan adalah untuk melakukan aktivitas imajinasi/intuisi, kreasi/kreativitas, inovasi dan seni. Tugas otak tersebut akhirnya adalah melakukan kegiatan berfisik untuk menghasilkan karya nyata melalui bahasa, logika, intuisi, kreatifitasnya untuk mempelajari pengetahuan umum dan pemahaman terhadap kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Jadi otak adalah sumber kekuatan manusia untuk menghasilkan karya nyata melalui proses berpikir.

Akal dan pikiran individu atau manusia secara umum dapat memfungsikan akan dan pikiran tersebut untuk suatu tujuan hidup. Selanjutnya aktivitas berpikir akan menghasilkan hasil piker, maka pada giliran selanjutnya akan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan misalnya aspek ekonomi, keuangan, politik, sosial, keamanan, dan budaya.

c. Potensi Sosial Emosional (Emotional)

Potensi berkenaan dengan hati, rasa, nafsu dan jiwa individu atau manusia pada umumnya. Merupakan potensi yang ada pada diri manusia yang fungsinya antara lain untuk mengendalikan amarah, motivasi, dan penilaian. Dengan demikian emosi individu tersebut tergantung bagaimana cara mengaktualisasikannya kedalam kehidupan seperti berinteraksi, berpartisipasi, dan penyesuaian diri. Oleh karena itu langkah yang paling strategis untuk menggapai sukses dan bahagia adalah membersihkan berbagai macam masalah yang mempengaruhi pada hatidan pikiran.

Ketiga jenis potensi diatas akan diarahkan oleh pribadi itu sendiri, apakah dioptimalkan pemanfaatanya sesuai dengan kebutuhannya atautkah dibiarkan begitu saja dengan berlalunya waktu, kesemuanya itu tergantung bagaimana pribadi itu mengelola potensi tersebut. Kecerdasan otak, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual menajdi kunci sukses dan kebahagiaan yang sangat penting.

Nashori (2003:98) menjelaskan bahwa manusia memiliki beragam potensi diantaranya adalah :

1) Potensi Berfikir

Manusia memiliki potensi berfikir. Seringkali Allah menyuruh manusia untuk berfikir. Maka berfikir logikanya orang hanya disuruh berfikir karena ia memiliki potensi berfikir. Maka, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru.

2) Potensi Emosi

Potensi yang lain adalah potensi dalam bidang afeksi/emosi. Setiap manusia memilki potensi cita rasa, yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan

dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada keindahan.

3) Potensi Fisik

Ada kalanya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olah raga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik.

4) Potensi Sosial

Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik dalam dataran pengetahuan maupun ketrampilan.

Menurut kutipan diatas, dapat dijelaskan bahwa potensi dari manusia itu beragam yang terdiri dari potensi berfikir, emosi, fisik dan sosial. dimana potensi-potensi ini dimiliki oleh manusia untuk belajar informasi-informasi baru menghubungkan berbagai informasi, menghasilkan pemikiran yang baru, setiap orang memiliki potensi cita rasa terhadap orang lain maupun alam, ada juga potensi yang membuat gerakan fisik dari seseorang untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien serta potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain.